SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putu Rio Rahdiana, S.STP.
Jabatan : Kepala Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Bali
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPD RI
selaku Sekretaris Jenderal DPD RI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 11 Mei 2026

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.	Putu Rio Rahdiana, S.STP.
NRP. 70070207	NIP. 197703151996011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR DPD RI DI IBU KOTA PROVINSI BALI

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	Persentase Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang sesuai dengan kewenangan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Bali	100%
2	Terwujudnya Pengelolaan Data terkait Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi terkait Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Bali	100%
3	Terwujudnya tata kelola DPD RI di Ibukota Provinsi yang efektif	Persentase terlaksananya dukungan manajemen Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Bali	100%

	Kegiatan / RO		Anggaran
A.	**Pengelolaan dukungan administrasi di Daerah Pemilihan**	**Rp**	**323.652.000**
1	001 - Laporan Materi Pengolahan Asmasda	Rp	-
2	001 - Laporan atas Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda	Rp	
3	CF.7983.PBC.001.051– Pengolahan Data Asmasda	Rp	10.552.000
4	CF.7984.PBC.001.051 – Telaah Asmasda untuk 32 Provinsi	Rp	313.100.000
B.	**Pengelolaan dukungan administrasi di Daerah Pemilihan**	**Rp**	**819.780.000**
1	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp	
2	959 - Layanan Protokoler	Rp	
3	962 - Layanan Umum	Rp	
4	994 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp	819.780.000
5	951 - Layanan Sarana Internal	Rp	
6	971 - Layanan Prasarana Internal	Rp	

Jakarta, 11 Mei 2026

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.	Putu Rio Rahdiana, S.STP.
NRP. 70070207	NIP. 197703151996011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).